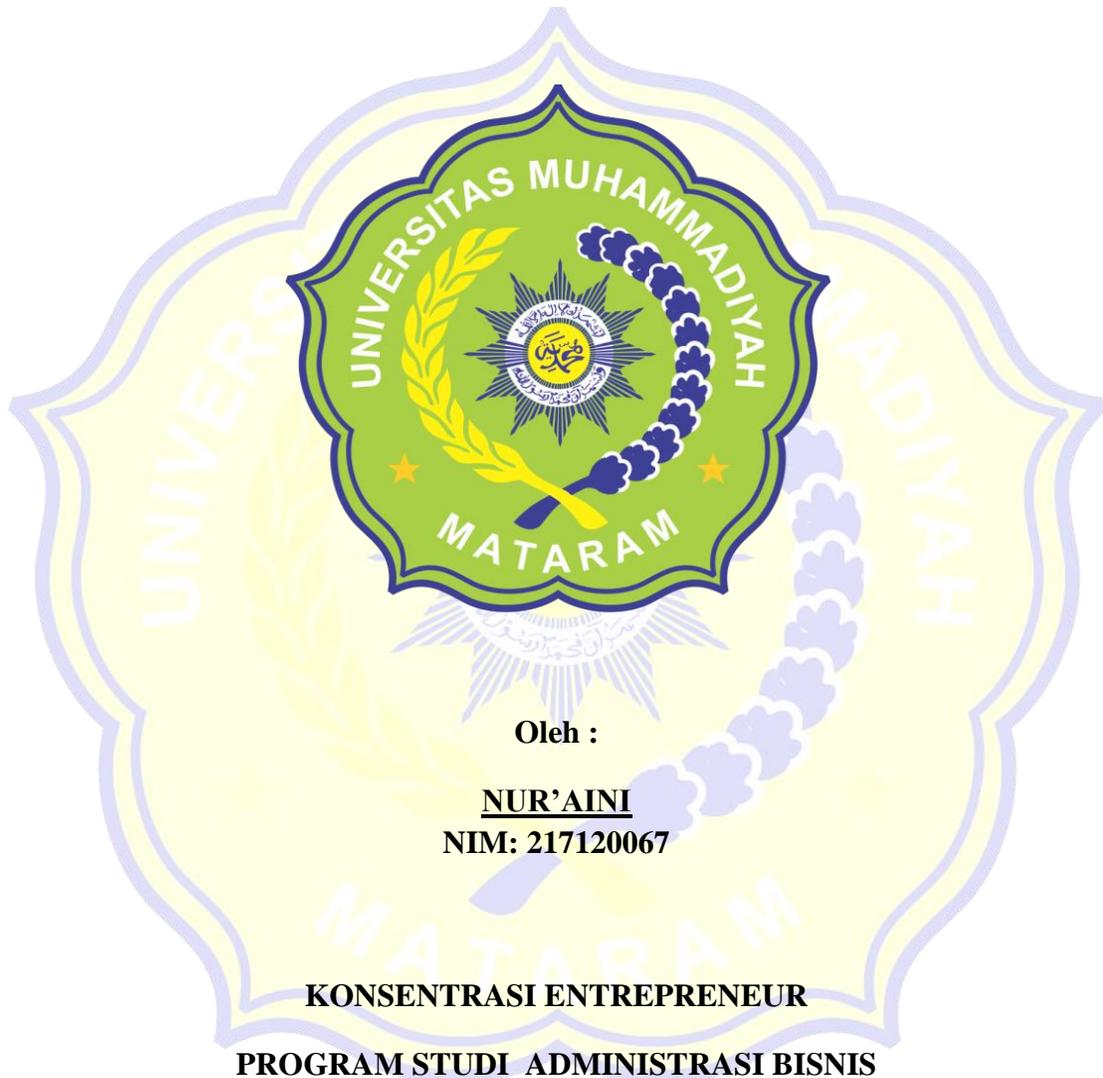


SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAANDANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA TUANANGA KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019**



Oleh :

NUR'AINI
NIM: 217120067

KONSENTRASI ENTREPRENEUR

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019**

OLEH :

**NUR'AINI
217120067**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah Mendapat Persetujuan Pada Tanggal, 8 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Darmasyah, M.Si
NIDN. 0008075914**



**Alfian Eikman, S.Sos., MA.
NIDN. 0803048303**

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis

Ketua

**Lalu Hendra Maniza, S.Sos. MM
NIDN.0828108404**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019**

OLEH :

NUR'AINI
217120067

Naskah skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan :

Mataram 11 Februari 2021

Dinyatakan Telah Dapat Diterimah Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) Diprogram Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tim Penguji

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

(PU)

Alfian Eikman, S.Sos., MA.
NIDN. 0803048303

(PP)

Iskandar, S.Sos., MA.
NIDN. 0802048904

(PN)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Nur'aini

Nim : 217120067

Alamat : Dusun Ai Aji Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar atau diploma pada perguruan tinggi manapun, dan bukan merupakan duplikasi sebagian atau seluruhnya dari karya orang lain yang diterbitkan atau yang tidak diterbitkan, kecuali kutipan berupa data atau informasi yang sumbernya dicantumkan dalam naskah dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan bertanggung jawab, dan saya bersedia menerima sanksi pembatalan skripsi apabila terbukti melakukan duplikasi terhadap karya ilmiah lain yang sudah ada.

Mataram, 11 Januari 2021



NUR'AINI

217120067



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur'aini
NIM : 217120067
Tempat/Tgl Lahir : Tua Nanga, 6 Juni 1998
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Pisipol
No. Hp/Email : 085237 197 948 / nurainiazahra32254@gmail.com
Judul Penelitian : -

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di desa Tua Nanga Kecamatan Poro Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 25 Februari 2021

Penulis



Nur'aini
NIM 217120067

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur'aini
NIM : 217120067
Tempat/Tgl Lahir : Tua Nanga, 6 Juni 1998
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 337 197 948
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektivitas pengelolaan Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di desa Tua Nanga Kecamatan Podo Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 25 Februari 2021

Penulis



Nur'aini
NIM 217120067

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Nur'aini, Lahir di Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano pada tanggal 6 Juni 1998. Anak terakhir dari pasangan bapak Mursidi dan Ibu Halimah. Saya merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan sekolah dasar di SDN Tua Nanga tepatnya di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan selesainya pada tahun 2011, dan pada tahun itu pula peneliti juga melanjutkan pendidikan di SMPN Satap Tua Nanga di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan selesainya pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengan Atas di SMAN 1 SETELUK dan selesai tahun 2017. Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik (FISIPOL) pada program studi administrasi Bisnis konsentrasi enterprener, peneliti menyelesaikan pendidikan strata S1 selama 3,5 tahun pada tahun 2021.

MOTTO

" Iringilah perjuangan dengan DO'A, Karena takdir = batas maksimal usaha
+ Do'a kita "

(Sherly Annavita Rahmi)

" Usaha tanpa Do'a itu sombong dan Do'a tanpa usaha itu sia-sia "

(Ali Bin Abi Thalib)

" Jangan pernah berharap bisa hidup mudah tanpa bersusah payah, karena
yang paling mudah dalam hidup itu adalah satu yaitu menyerah "

(Sherly Annavita Rahmi)

PERSEMBAHAN

Yang utama dan segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt.

“Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, membekaliku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW .”

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

1. Orang tua tercinta ibu Halimah dan bapak Mursidi, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tidak mungkin akan ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini sebagai langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia karena kusadar, selama ini aku belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan bapak yang selalu memberikan aku motivasi dan semangat untuk terus berjuang dan selalu menyirami kasih sayang, dan selalu mendoakanku, sekali lagi terimakasih ibu dan bapak.

2. Untuk seluruh keluarga yang sudah mendukung dan mendoakan saya. Untuk kakak-kakak saya, terutama kak Lia ibu kedua bagiku.
3. Untuk sahabat yang sudah berjuang bersama-sama dari awal masuk kuliah, terimakasih atas bantuan, motivasi, dan nasehatnya.



KATA PENGANTAR

اللَّهُمَّ حَمِّنَا لِرَّحْمَتِكَ حَمِيمِينَ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat RahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019”** walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Skripsi ini diajukan salah satu syarat gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti baik moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, saya selaku penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Lalu Hendra Maniza. S.sos., M.M selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis

4. Drs. H. Darmasnyah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Alfian Eikman, S.Sos.,MA. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmu, membimbing serta didikan yang sangat berharga selama masa perkuliahan di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Orang tua beserta keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil bagi penulis agar dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.

Mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Mataram, 8 Februari 2021

Penulis

NUR'AINI
217120037

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019**

Nur'aini, Alfian Eikman, S.Sos., MA., Drs. H. Darmansyah, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah efektivitas pengelolaan dana desa serta masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa (ADD) yang dalam hal ini akan berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan desa. Adapun sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada informan dan data sekunder yaitu berupa arsip dokumen yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa (ADD) di desa Tua Nanga terdiri dari 5 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya dalam prosesnya masih mengalami berbagai kendala disebabkan Sumber Daya aparatur desa yang masih rendah. Adapun kendala atau masalah yang dihadapi yaitu partisipasi masyarakat yang masih minim, Sumber Daya Manusia masih rendah. Adapun saran dalam hal ini yaitu harus meningkatkan partisipasi masyarakat, dan SDM ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

**THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (ADD) IN
DEVELOPMENT IN TUA NANGA VILLAGE, POTO TANO, WEST
SUMBAWA REGENCY, 2019**

Nur'aini, Alfian Eikman, S.Sos., MA., Drs. H. Darmansyah, M.Si

ABSTRACT

This research was entitled the effectiveness of village fund management (ADD) in development in Tua Nanga village, Poto Tano, West Sumbawa Regency in 2019. This research was descriptive qualitative by using an inductive approach. This research's formulation problem is how village fund management's effectiveness and the problems faced in managing village funds (ADD. The data sources were primary data in interviews with the informants, and secondary data was the relevant documents.

This study indicated that the management of village funds (ADD) in Tua Nanga village consists of 5 stages, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Management of village funds was under applicable regulations but still has various obstacles. The problems faced were minimally community participation and low human resources.

Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation

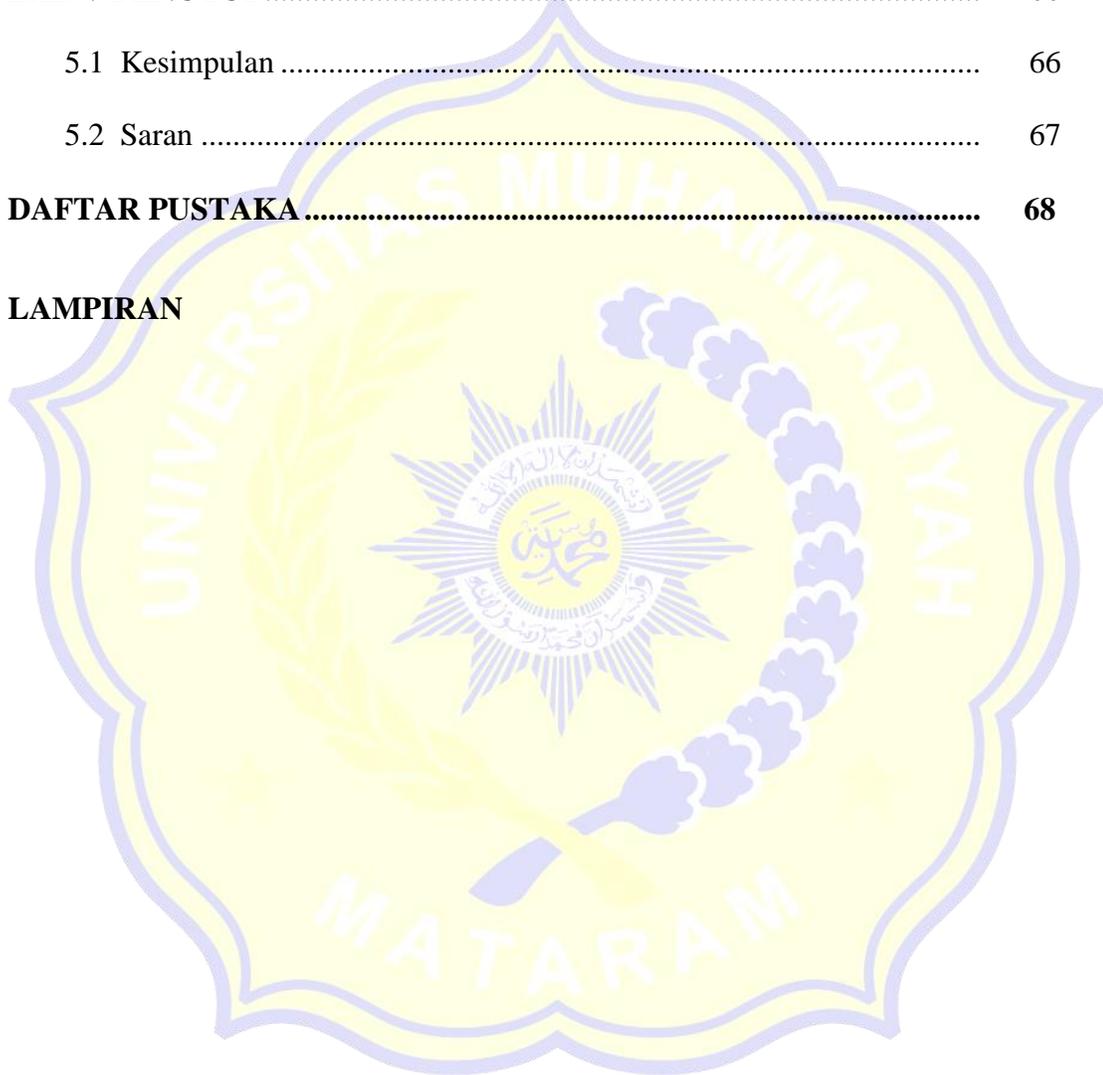


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8

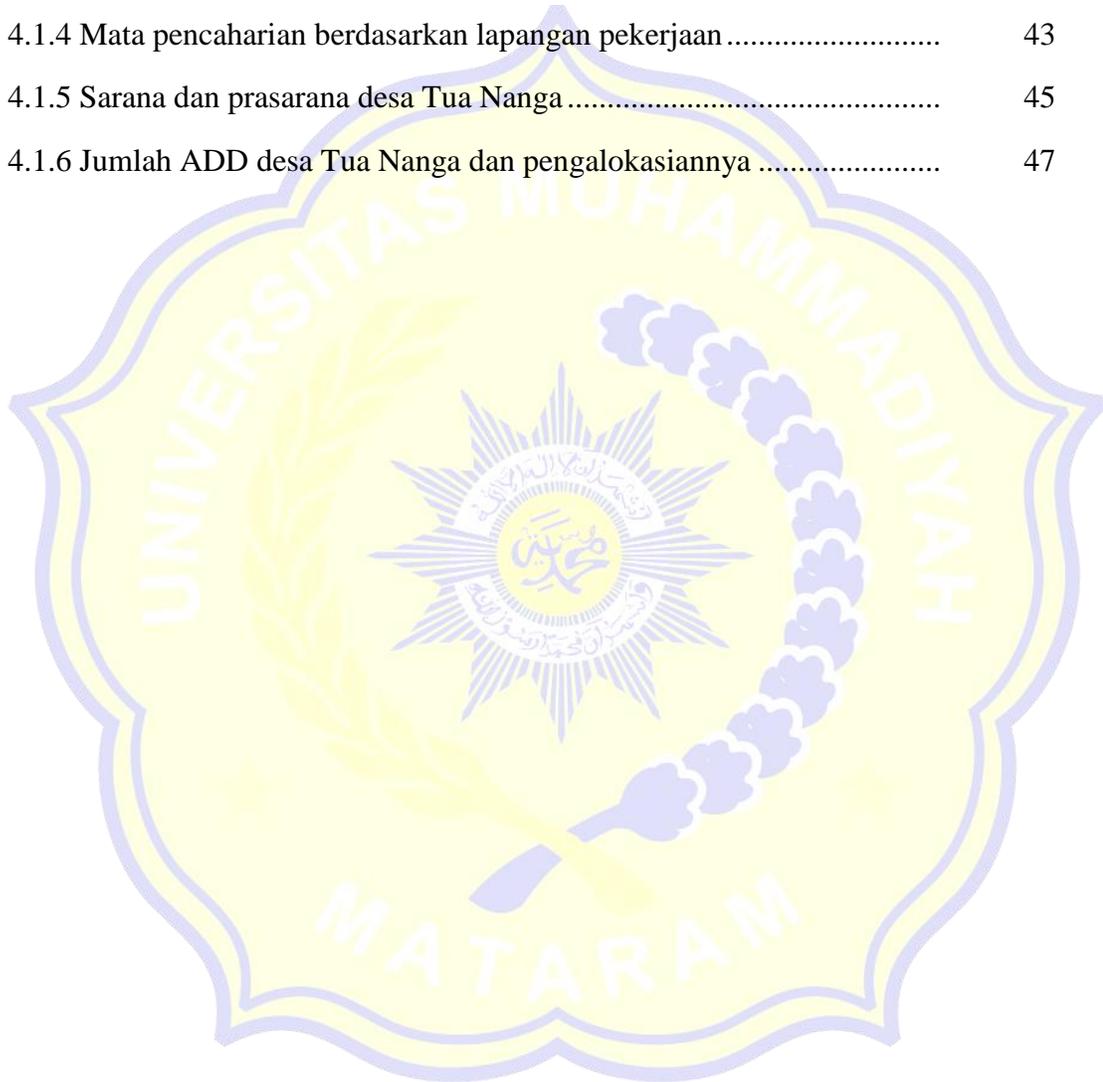
2.2. Efektivitas	11
2.2.1. Pengertian Efektivitas	11
2.3. Tinjauan Tentang Manajemen	12
2.3.1. Pengertian Manajemen	12
2.3.2. Fungsi-fungsi Manajemen	14
2.3.3. Prinsip-prinsip Keuangan Daerah	20
2.4. Tinjauan Tentang Dana Desa	22
2.4.1. Pengertian Dana Desa	22
2.4.2. Penggunaan Dana Desa.....	22
2.4.3. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	25
2.5. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Jenis Sumber Data	33
3.4 Teknik Penentuan Narasumber	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	39
4.4.1 Gambaran Umum Desa Tua Nanga.....	39
4.2 Efektivitas pengelolaan ADD di Desa Tua Nanga	45

4.2.1 Pengelolaan ADD di Desa Tua Nanga	45
4.2.2 Efektivitas pengelolaan ADD.....	60
4.3 Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan ADD.....	63
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	8
4.1.2 Jumlah penduduk desa Tua Nanga berdasarkan jenis kelamin	41
4.3.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	42
4.1.4 Mata pencaharian berdasarkan lapangan pekerjaan	43
4.1.5 Sarana dan prasarana desa Tua Nanga	45
4.1.6 Jumlah ADD desa Tua Nanga dan pengalokasiannya	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan di Indonesia dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan disebabkan pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan Perekonomian di daerah perkotaan yang lebih maju. Pada kenyataannya terjadi ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta ketimpangan kota dengan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin pada tahun 2013 di Indonesia 28,07 juta orang, pada daerah perkotaan jumlah 10,5 juta orang penduduk miskin dan di desa sebesar 17,74 juta orang. (<http://www.bps.go.id/?news=1023>)

Data di atas memberikan gambaran faktual kondisi yang terjadi dalam masyarakat perdesaan secara keseluruhan. Sangat ironis memang dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas kurang lebih 4,8 juta km² dengan luas daratan 1,9 juta km² yang tersebar di 62.806 desa. (Wasistiono dan Tahir

2007: 1). Penduduk miskin di Indonesia bermukim di desa dengan kondisi yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan makna dasar bahwa desa menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan menganut prinsip *money follow function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. (Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Agus Subroto: 2009). Menurut Widjaja (2012: 24) menyatakan fungsi pemerintah desa hanya sebagai unsur pelaksana daerah yang kegiatannya dirancang dari atas ke bawah (*top down planning*) sehingga bersifat sentralistik.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa tersebut. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan maka diperlukan sumber pendapatan desa. Sejalan dengan hal itu Widjaja (2012: 133) maka pemerintah memberikan Alokasi Dana APBD Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10% untuk pemerataan pembangunan di pedesaan. Pembangunan fisik merupakan wujud dari pembangunan desa, akan tetapi sarana dan prasarana desa masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka dana merupakan faktor dasar dalam meningkatkan pembangunan desa.

Sesuai dengan pernyataan Simanjuntak (dalam Agus Subroto, Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 2009) bahwa transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas desa yang memperolehnya.

Pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Indonesia pada beberapa desa ditemukan indikasi pelanggaran penyalahgunaan bantuan anggaran ADD senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) di desa Sambiroto kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah (Antara Jateng.com, Jumat 17 Januari 2014). Hal serupa juga terjadi di desa Paseban, Jember Jawa Timur terjadi penyelewengan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa setempat (rri.co.id tanggal 30 Januari 2014). Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapat terkelola dengan baik. Kelembagaan desa yang

kuat dapat menjamin keberlanjutan ADD dan program yang dibiayai ADD dapat melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 besaran penggunaan Alokasi Dana desa yakni paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non-fisik kampung terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa. Sisa Alokasi Dana desa sebesar maksimal 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan desa, Badan Permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa.

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa. Pengelola ADD tersebut secara profesional dituntut untuk mengelola ADD secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Daerah yang berlaku. Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola ADD.

Salah satu desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumbawa Barat adalah Tua Nanga yang terletak di Kecamatan Poto Tano . Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa ini berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti dengan

melakukan wawancara kepada Sekretaris Kecamatan Poto Tano jika dibandingkan dengan 9 (sembilan) desa lain yang menerima Alokasi Dana Desa di Kecamatan Poto Tano ini pembangunan yang paling minim adalah di desa Tuananga. Pembangunan dalam hal infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga masih rendah. Padahal desa Tua Nanga termasuk sebagai desa penerima ADD dengan jumlah yang lumayan tinggi. Besaran jumlah ADD Tahun 2019 adalah Rp 1.059.116.149.

Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan ADD menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan Pemerintahan khususnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Pada kenyataannya di Desa Tuananga kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksana kebijakan ADD khususnya di bidang teknis dirasa kurang memadai berdasarkan pra-riset tersebut di Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Dilihat dari pendidikan aparatur desa yang rata-rata tamatan SMA/SMK, Kurang mahir dalam mengaplikasikan komputer, belum bisa menyerap banyak aspirasi masyarakat, pelaksanaan yang kadang-kadang tidak bisa selesai tepat waktu. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan program akibat perlunya pembinaan terus menerus yang akan menyita waktu yang dialokasikan. Pada kenyataannya pemerintah desa tersebut masih banyak mengabaikan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pembangunan desa Tuananga dapat dikatakan masih rendah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat terlihat bahwa sarana dan prasarana di desa Tuananga masih minim. Untuk pembangunan fisik yaitu dalam bidang pendidikan yaitu PAUD dan TK hanya ada satu, ini dinilai masih kurang oleh masyarakat. Seharusnya ada 2 atau 3 karena mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam bidang kesehatan juga masih kurang, Posyandu yang hanya ada satu unit, yang seharusnya dibutuhkan sebanyak 3 unit untuk melayani segala kegiatan dengan jumlah orang yang dilayani cukup banyak. Untuk kondisi jalan utama menuju lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat di sana sangat memprihatinkan. Ditambah dengan kondisi cuaca musim penghujan saat ini menambah rusaknya jalan. Tidak heran bila sering terjadi jalan amblas dan terjadi putusnya jembatan. Tidak hanya dalam hal pembangunan fisik saja namun dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat juga masih rendah, dilihat dari sikap tidak peduli dari pemerintah desa terhadap UMKM yang ada di desa Tua Nanga.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Tuananga agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas pengelolaan Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019?
2. Apa saja masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan dana desa dalam pembangunan di desa Tua Nanga .
2. Identifikasi masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh serta memperdalam pengetahuan mengenai sumber daya manusia khususnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan .
- b. Sebagai rujukan dan bahan referensi bagi pembaca maupun penelitian selanjutnya terhadap Mahasiswa FISIPOL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM terkait dengan pengelolaan dana desa (ADD) dalam pembangunan di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Keterangan	Uraian
1	Nama, Tahun	Andi Sri Siti Hutami, 2017
	Judul	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Teknik Pengumpulan Data	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
	Persamaan	Metode yang Digunakan
	Perbedaan	Tempat dan Waktu Penelitian
	Temuan	Proses Pengelolaan ADD Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelola ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan. Petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun

		<p>prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi pengguna ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya.</p>
2	Nama, Tahun	Nova Sulastri, 2016
	Judul	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Teknik Pengumpulan Data	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
	Persamaan	Metode yang Digunakan
	Perbedaan	Tempat dan Waktu Penelitian
	Temuan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan</p>

		pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian,tahapan perencanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan Musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya tranparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada Masyarakat.
3	Nama, Tahun	Endry Adrianto, 2016
	Judul	Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Teknik Pengumpulan Data	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
	Persamaan	Metode yang Digunakan
	Perbedaan	Tempat dan Waktu Penelitian
	Temuan	Fungsi Manajemen dari G.R Terry yaitu POAC dapat dikatakan kedua pemerintahan kampung sudah baik dalam pengelolaan dana kampung 2015 walaupun belum maksimal. Prinsip manajemen keuangan daerah dari Waluyo

		<p>akuntabilitas dan <i>Value for money</i> sudah dapat dikatakan baik tetapi untuk indicator transparansi pengelolaan dana kampung di kampung Ono Harjo masih rendah, sedangkan di kampung Nambah Dadi lebih baik.</p> <p>Faktor pendukung pengelolaan dana kampung :(a) kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi mempunyai sekretaris kampung yang sigap dalam pengelolaan dana desa 2015.(b) Antusias warga tinggi di Musrenbang.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Kurniawan (2005:109), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas dalam

(Munir dkk 2004:44) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengukur sampai sejauh mana perusahaan pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang direncanakan atau ditetapkan diawal dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Bila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan maka sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan.

Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu: (a) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai; (b) Ketetapan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) Hasil sesuai harapan masyarakat.

2.3 Tinjauan Tentang Manajemen

2.3.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen bukanlah suatu tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan atau laba. Walaupun manajemen hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Hasibuan (2009:2) mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Terry dan Rue dalam Sundari (2011:11), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan-kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola. Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2009:2), Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap

organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

2.3.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Ilmu manajemen memiliki fungsi-fungsi di dalamnya. Banyak ahli yang mengungkapkan fungsi-fungsi manajemen dengan pendapat yang berbeda. Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah” menguraikan beberapa fungsi manajemen dari berbagai ahli. Menurut G.R. Terry fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.

A. Perencanaan

a) Pengertian Perencanaan

Menurut Hasibuan (2009: 91), perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing, staffing, directing, dan controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akandiketahui pada masa depan. Agar

resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada.

Menurut Terry (2012:46) mengatakan, ”Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah Sebuah proses tahapan penentuan tujuan organisasi menggunakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan pendekatan hasil yang dicapai.

1. Tujuan Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik memiliki tujuan-tujuan di dalamnya. Tanpa tujuan, maka perencanaan tidak akan memiliki manfaat. Berikut ini adalah tujuan perencanaan menurut Hasibuan (2009: 95) yaitu:

- a) Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.
- b) Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan.

- c) Perencanaan adalah suatu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
 - d) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan.
 - e) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan.
 - f) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil kerja.
 - g) Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian.
 - h) Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari *mismanagement* dalam penempatan karyawan.
 - i) Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi.
- Menurut Hasibuan (2009:95), jenis-jenis rencana terdiri dari:
- a) Tujuan (*Objective*); b) Kebijaksanaan (*Policy*); c) Prosedur; d) *Rule*; e) Program; f) *Budget*; g) Metode; h) Strategi.

B. Pengorganisasian

1) Pengertian Pengorganisasian

Menurut Hasibuan (2009:118), Fungsi pengorganisasian (*organizing*= pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (*subsistem*)

serta penentuan hubungan-hubungan. *Organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Terry dalam Wiludjeng (2007: 92) mengatakan, "*Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective*". Artinya, Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan Tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah proses penetapan tugas-tugas, siapa yang bertugas dan bagaimana tugasnya melalui pembagian tugas, sehingga setiap individu dalam kelompok organisasi dapat saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama.

C. Pengarahan

1. Pengertian Pengarahan

Menurut Hasibuan (2009:183) Fungsi pengarahan (*actuating*) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini

baru dapat dijalankan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja selektif dalam mencapai tujuan perusahaan.

Terry dalam Hasibuan (2009:183) mengatakan, "*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*". Artinya, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Sedangkan Reinecke dan Schoell dalam Ranupandojo (1996:101), mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengarahan intinya ialah arahan atau dorongan dari pimpinan untuk bekerjasama dalam memaksimalkan peran dan fungsinya anggota di organisasi.

2. Tujuan Pengarahan

Menurut Yahya (2006:111), secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap organisasi adalah sebagai berikut: a) Menjamin kontinuitas perusahaan (organisasi); b) Membudayakan prosedur standar; c) Menghindari kemangkiran yang tak berarti; d) Membina disiplin kerja; e) Membina motivasi terarah.

D. Pengendalian

1) Pengertian Pengendalian

Menurut Hasibuan (2009:241), Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
- b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- c) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Dengan demikian peranan pengendalian sangat menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan suatu rencana.

Strong dalam Hasibuan (2009:241) mengatakan, "*controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans*". Artinya, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketetapan dalam rencana.

Terry dalam Hasibuan (2009: 242) mengatakan, "*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard*". Artinya, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengendalian adalah proses pengaturan atau mengendalikan berbagai faktor di dalam organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan proses perbaikan apabila terdapat penyimpangan antara rencana dan tujuan.

2. Tujuan Pengendalian

Menurut Hasibuan (2009:242) tujuan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a) Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- c) Agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya.

2.3.3 Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Daerah

Menurut Waluyo (2007:218) Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah secara sederhana, sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga siklus pokok yaitu antara lain; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*.

- 1) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Dengan demikian transparansi akan memberikan arti bahwa setiap anggota masyarakat di daerahnya masing-masing memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang dibuat bahkan implementasinya setiap rupiah yang dialokasikan karena menyangkut aspirasi dan kepentingan terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan transparansi adalah suatu proses keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik guna memberikan informasi kepada publik secara terbuka, jujur dan menyeluruh.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintahan daerah terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, namun demikian juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti memberikan kesimpulan, akuntabilitas ialah sesuatu kewajiban yang harus disampaikan kepada publik atas pengelolaan anggaran atau sumber daya yang di kelolanya guna kemaslahatan publik.

3) *Value for Money*

Value for Money adalah bagaimana proses penganggaran tersebut memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga wajar. Efisiensi berarti bahwa penggunaan sumber daya masyarakat (*public money*) tersebut menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna) bagi kepentingan masyarakat, sedangkan efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Peneliti menyimpulkan *value for money* adalah adanya suatu nilai dari pengelolaan keuangan publik sehingga tercapai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas yang baik.

2.4. Tinjauan Tentang Dana Desa

2.4.1. Pengertian Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

1) semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
dan

2) semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.4.3. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparat pemerintah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang prosesnya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah. Menurut Nugroho (2014:136), bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *Carry out* kebijakan public yang efektif.

Menurut Jhon P (2015), dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dana desa, perlu adanya komitmen bersama dan

pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar kepala desa beserta perangkat desanya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini:

1) Integritas dari kepala desa dan perangkat desa

Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa.

2) Tata kelola

Hal kedua yang harus ada agar pengelolaan keuangan desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya (Permendagri No 37 tahun 2007), maka sistem baru lebih sederhana sehingga diharapkan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang beragam.

3) Kapasitas SDM

Supaya pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, maka diperlukan pengelola keuangan yang berkompeten. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses

yang membutuhkan waktu. Jika dikaitkan antara kapasitas dengan jumlah dana yang menjadi hak desa untuk dikelola, maka ada trade off yang akan harus dilakukan. Asas kehati-hatian perlu dilaksanakan oleh kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mencairkan dana yang menjadi hak desa. Jika memang kualitas SDM yang dimiliki belum memadai, maka lebih baik dana yang dicairkan dibawah nilai yang menjadi hak desa sembari kabupaten memberikan pemahaman kepada desa yang bersangkutan mengapa dana tidak bisa cair. Bisa jadi desa akan melakukan protes kepada kabupaten karena merasa haknya tidak dipenuhi. Namun, cara ini dipandang lebih aman untuk mencegah masalah-masalah penyimpangan dana yang bisa terjadi yang tentunya akan menghabiskan energy untuk memperbaikinya.

4) Pengawasan warga

Salah satu cara untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dana desa adalah dengan adanya pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, jika kondisi warga belum memiliki sikap peduli dan empati serta kritis mengawasi pengelolaan APBDes ini, maka kabupaten perlu memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga didalam melaksanakan pengawasan. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diwujudkan, pemerintah kabupaten perlu inisiatif melakukan upaya-upaya yang diperlukan supaya alokasi dana desa

yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat bisa benar-benar direalisasikan.

2.5 Kerangka Berfikir

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Melalui Alokasi Dana Desa, Desa diharapkan Mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap pembangunan yang terjadi di desa. Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan pedoman pelaksanaan Teknis mengenai proses pengelolaan ADD melalui Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2018. Dalam Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2018.

Namun demikian tim pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Adapun tahapan dalam alokasi dana desa, yaitu perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, penatausahaan ADD, pelaporan ADD, pertanggungjawaban ADD.

Dalam UU nomor 6 tahun 2014 adanya ketentuan bahwa “ keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” peneliti mendasari unsur tersebut untuk menilai perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, penatausahaan ADD, pelaporan ADD, pertanggungjawaban ADD.

1. Partisipatif

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. partisipatif tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasidan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

3. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo 2009 :18) Keberhasilan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun didalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat.

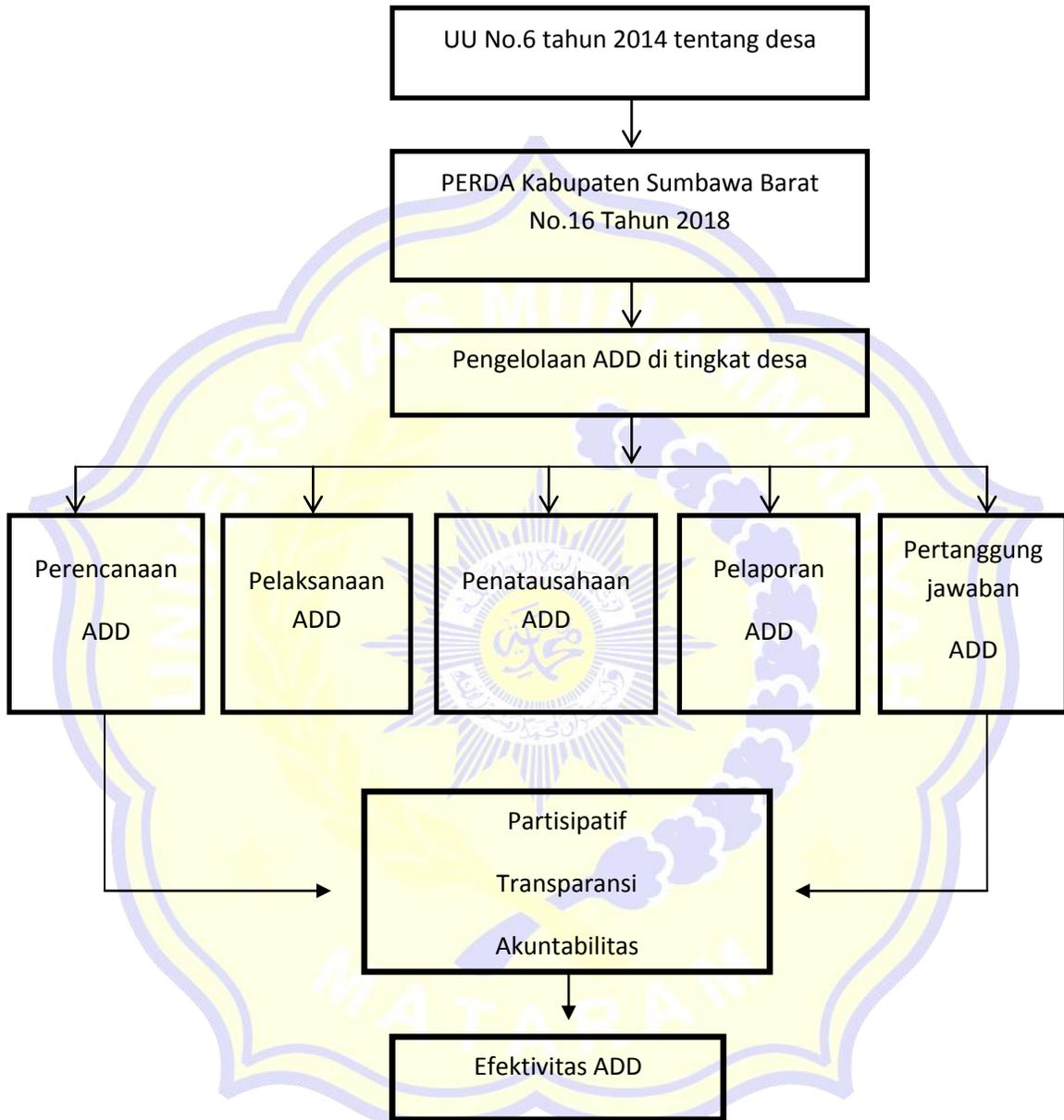
Setiap kegiatan ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dilokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ari fyianto dan Kurrohman, 2004).

Untuk menilai pengelolaan ADD sudah efektif atau belum, secara sederhana dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan. Sejauh mana pemerintah desa memaknai pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dana desa. Karena partisipasi masyarakat menentukan penetapan prioritas desa yang akan ditetapkan. Selanjutnya prinsip transparansi, bagaimana pemerintah desa mampu menerapkan prinsip transparan kepada masyarakat Tua Nanga. Transparan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah penyimpangan dana desa. Dalam hal ini masyarakat harus lebih kritis. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, seperti apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat Tua Nanga.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan pada skema dibawah ini :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis pada pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Creswell (2013:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan, pemberdayaan dan Efektivitas pengelolaan dana desa, mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konsepisme manajemen Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dalam penelitian lapangan kejadian yang ada dilapangan akan dikaji dan diteliti secara mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tua Nanga Kecamatan pototano Kabupaten sumbawa barat. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola Alokasi Dana

Desa di Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat perlu ditingkatkan guna mendukung pembangunan dan terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel. Waktu dilakukan penelitian ini adalah mulai bulan September 2020 sampai Februari 2021.

3.3. Jenis Sumber Data

Sumber Data Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dengan penelitian yang mana bisa dikenal ada dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Oleh karena itu, diperlukan data sebuah data yang benar dalam suatu penelitian, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah juga. Dalam penelitian cara pengumpulan data dapat didapatkan melalui sumber primer dan sekunder. Dari uraian penjeelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti perlu mengumpulkan data :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain adalah melakukan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data primer diperoleh dari pemerintah Desa Tuananga berupa dokumen-dokumen yang terkait tentang profil desa,

pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum, serta alokasi dana desa untuk pemberdayaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.4 Tehnik Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tua Nanga.
2. Sekretaris Desa Tua Nanga.
3. Bendahara Desa Tua Nanga.
4. Ketua BPD Tua Nanga (Badan Permusyawaratan Desa).
5. Masyarakat Desa Tua Nanga 5 Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2014:401). Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam terkait pengelolaan alokasi dana desa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bersifat terbuka dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Masyarakat di Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Yaitu berupa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti akan turun kelapangan untuk menggali data melalui observasi non partisipan. Yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya. Melalui observasi, deskripsi objektif dari individu-individu dalam hubungannya yang aktual satu sama lain dan hubungan mereka dengan lingkungannya dapat diperoleh. Dengan mencatat tingkah laku ekspresi mereka yang timbul secara wajar, tanpa dibuat-buat, teknik observasi menjadi proses pengukuran (evaluasi) itu tanpa merusak atau mengganggu kegiatan-kegiatan normal dari kelompok atau individu yang diamati. Data yang dikumpulkan melalui observasi mudah dan dapat dianalisis.

3.6 Tehnik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka dapat diadakan pengolahan data atau yang disebut dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Bikden sebagaimana dikutip (Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2009:180) adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatancatatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisis dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisis data yaitu mengikuti alur yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama sebelum dan sesudah penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

a. Mereduksi Data

Yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data-data yang ada sedemikian rupa, kemudian ditentukan pola yang dapat memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan pola tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mencari kelengkapan data yang belum diperoleh.

b. Penyajian Data

Yaitu data yang telah disusun dalam pola, selanjutnya akan dianalisa terus-menerus bersamaan dengan perolehan data baru yang terkait dengan permasalahan, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data juga dapat berupa grafik, matriks, dan network (jejaring kerja).

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dilakukan berdasarkan yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/ arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Simpulan dilakukan melalui pelukisan dan verifikasi.